ABSTRAK

Konsep *al-maṣlaḥah* merupakan suatu ijtihad atas perbuatan yang tidak ada ketentuan hukum di dalam *naṣ*. Akan sangat terkait dalam permasalahan politik yang semakin berkembang pada suatu peradaban bangsa dan kepentingan manusia. Kepentingan manusia di dunia ini yang semakin tinggi menyebabkan interaksi hidup manusia juga semakin kompleks. Sehingga mengharuskan adanya suatu konsep pemerintahan/negara untuk menjembataninya. Al-Ghazali dan ibn Taimiyah merupakan dua pemikir besar yang menjadi rujukkan atas konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dalam politik kenegaraan ini. Al-Ghazali yang terkenal sebagai tokoh filsafat Islam serta ibn Taimiyah terkenal sebagai tokoh Aqidah, mereka sama-sama menawarkan pemikiran politik kenegaraan. Faktor-faktor internal dan eksternal menyebabkan kedua tokoh sunni ini berbeda dalam merumuskan konsep politik kenegaraan. Sehingga penulisan ini dalam rangka untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan antara al-Ghazali dan ibn Taimiyah, serta apa penyebab yang mendasari perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif analisis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mengetahui secara detail penerapan *al-maṣlaḥah* dalam pemikiran politik kenegaraan al-Ghazali dan ibn Taimiyah.

Hasil dari penelitian ini diketahui al-Ghazali dan ibn Taimiyah mempunyai pandangan yang sama bahwa pemerintahan/politik adalah sistem yang menjamin kemaslahatan hakiki umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, serta hal ini merupakan usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat dengan membimbing mereka ke jalan yang lurus demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Peratutan/hukum yang berlaku pada suatu negara tidak harus berdasarkan tekstual *naṣ* al-Qur'an dan Hadis. Namun dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat yang dapat menjamin secara pasti aktualisasi agama, mempertahankan jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Sehingga dapat dikatakan al-Ghazali dan ibn Taimiyah menerapkan *al-maṣlaḥah ḍarūriyah*. Perbedaan pemikiran politiknya bahwa al-Ghazali menerima tokoh Quraish sebagai kepala negara karena menganggap bagian dari agama beserta konsep khilafahnya. Namun ibn Taimiyah menekankan seseorang bersifat *al-quwwat* dan *al-amānat* yang pantas menjadi kepala negara serta rakyat yang berhak menentukan sebuah bentuk negara yang mereka sepakati. Perbedaan formulasi dan implementasi antara al-Ghazali dan ibn Taimiyah disebabkan perbedaan situasi kondisi yang melingkupinya, latar belakang pendidikan dan perjalanan karir hidup mereka.

Negara merupakan simbol eksistensi yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Perangkat pemerintahan yang berjalan baik, umat akan dapat menjalankan kewajiban syariat dengan sempurna. Al-Ghazali dan ibn Taimiyah menawarkan solusi politik kenegaraan melalui konsep penerapan *al-maṣlaḥah* dengan tujuan yang mulia yaitu untuk tercapainya kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id